



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
#melayani
#bangsa



LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2025



DINAS PERHUBUNGAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2025 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam Dokumen Penetapan Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja yang bertujuan sebagai berikut :

1. Wujud akuntabilitas/ pertanggungjawaban kepada publik sebagai penerima amanat
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan ini melaporkan capaian indikator kinerja utama Tahun 2025 yang dikaitkan dengan rencana kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dengan total 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam 1 (satu) Tujuan Strategis yaitu V/C Ratio dan 2 (Dua) Sasaran Strategis yaitu Kecepatan rata-rata dan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2025, Dinas Perhubungan merealisasikan kinerjanya dengan baik dimana 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama capaiannya lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$). Indikator V/C Ratio dengan target 0,71 realisasi 0,73 (97%) dan capaian indikator Kecepatan rata-rata dengan target 34,80 realisasi 37,88 (109%), Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan dengan 59,97% realisasi 81,10% (99,9%). Di Dinas Perhubungan terdapat anggaran belanja dan anggaran pendapatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 111.343.637.376 terealisasi Rp. 106.919.426.416 dengan capain 96,03%. Sedangkan anggaran pendapatan dengan target Rp. 135.000.000 terealisasi Rp. 142.762.000 dengan capaian 105,75%.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

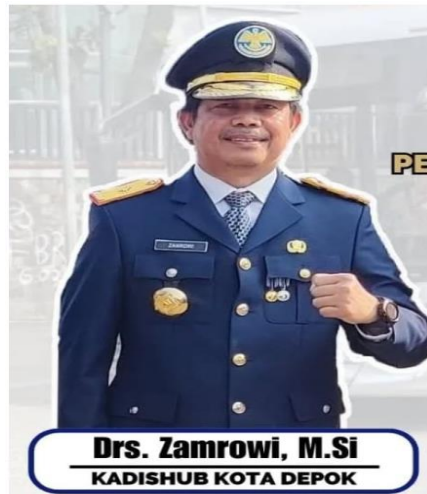
Depok, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK



Zamrowi
Drs. ZAMROWI, M. Si
196606071986101005

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Dinas Perhubungan telah menyelesaikan program dan kegiatan di Tahun 2025 dan menyusun Laporan Kinerja ini tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan serta kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur untuk mendorong perbaikan kinerja.

Walaupun masih banyak kekurangan dalam laporan kinerja ini, semoga bisa menjadi sarana informasi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dan dapat memberikan umpan balik berupa masukan kepada Dinas Perhubungan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan secara optimal dimasa yang akan datang

Depok, 30 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK**



Drs. ZAMROWI, M. Si
196606071986101005

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4. Isu Strategis/ Permasalahan Utama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Srategis (Renstra).....	12
2.2. Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi.....	15
3.2 Realisasi Kinerja V/C Ratio dan Kecepatan rata-rata.....	16
3.3 Capaian Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025.....	37
BAB IV P E N U T U P.....	39
4.1. Kesimpulan	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintahan, Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2029 menjadi laporan keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis atas capaian kinerja tahun 2025 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1.2 Tugas, Fungsi

1.2.1. Kelembagaan

Dinas Perhubungan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Dalam peraturan tersebut disebutkan Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Walikota Depok nomor 79 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

1.3 Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan di bidang teknis meliputi bidang lalu lintas, bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban, bidang angkutan dan unit pelaksana teknis dinas;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian serta penyelarasan penyelenggaraan system transportasi kota;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data, dan penyusunan Renstra Dinas;



- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariat dan Dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, asset Dinas dan pengkoordinasian perencanaan dinas; pengelola keuangan Dinas;
- j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat ;
- k. Pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas. Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang lalu lintas dan perkeretaapian kota;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Bidang Lalu Lintas;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari:

- a. Seksi Prasarana Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
- b. Seksi Perencanaan, Analisis dan Pengembangan Lalu Lintas

4. Bidang Angkutan

Bidang angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perhubungan di bidang angkutan. Bidang angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan;
 - c. Pelayanan dan penyelenggaraan angkutan dan/atau barang;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Angkutan;
 - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Angkutan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- Bidang Angkutan terdiri dari:
- a. Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota; dan
 - b. Seksi Angkutan Lintas Batas.

5. Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

Bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban. Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban; eksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran;
- c. Penyelenggaraan bimbingan keselamatan dan ketertiban pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban terdiri dari:

- a. Seksi Ketertiban dan Perparkiran.
- b. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri. Di Dinas Perhubungan terdapat 3 UPTD yaitu :

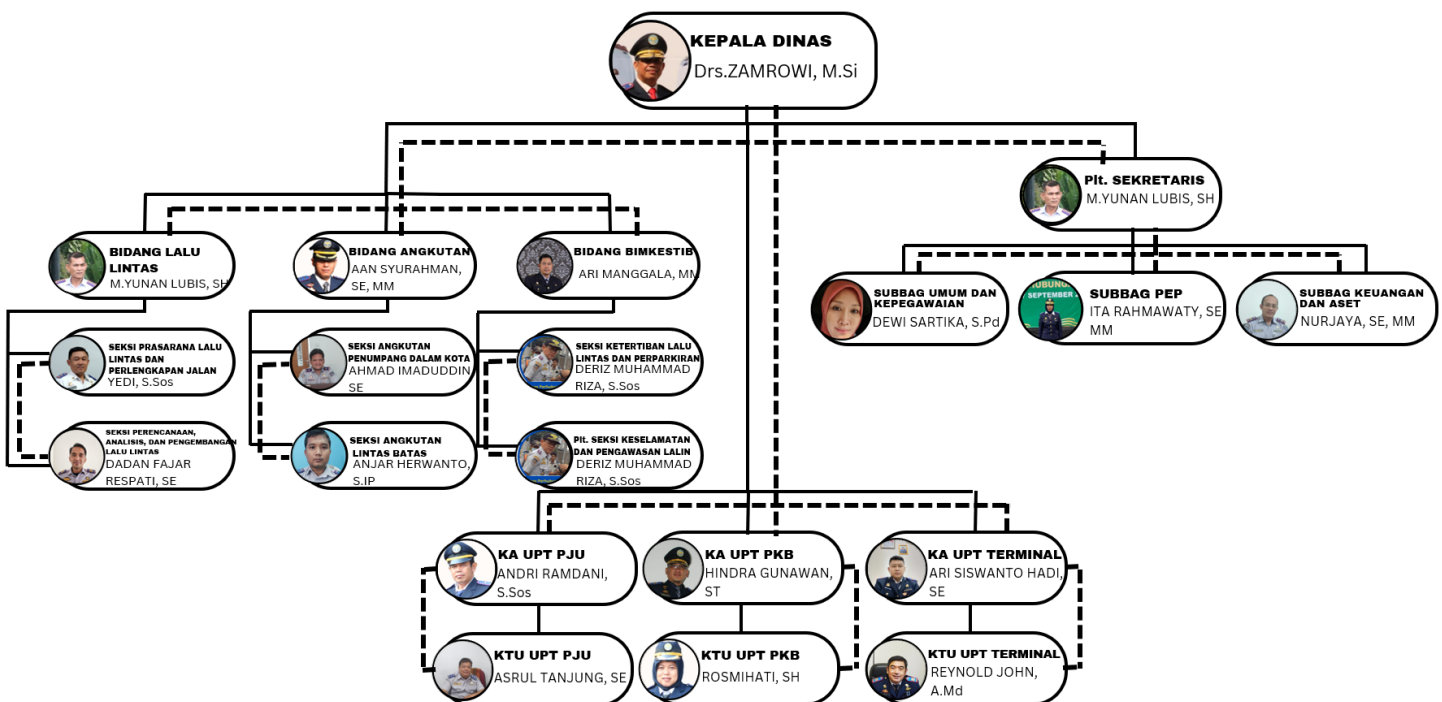
- a. UPT Penerangan Jalan Umum
- b. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. UPT Terminal

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



1.4. Isu Strategis/Permasalahan Utama

Dinas Perhubungan merupakan unit teknis di Pemerintahan Daerah Kota Depok yang terkait dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang penting dalam menunjang perekonomian dan Pembangunan. Berbagai Upaya dilakukan agar angkutan umum kembali menjadi pilihan utama Masyarakat dan dapat diakses oleh semua lapisan Masyarakat. Perkembangan Pembangunan di berbagai sektor tentunya juga membawa dampak bagi permasalahan transportasi. Masalah transportasi di Kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas. Lebih jauh lagi, bahwa saat ini kita juga harus mulai mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Tabel 1.1 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
1.	Infrastruktur jalan terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya ruas jalan pendamping 2. Terbatasnya kapasitas jalan dan simpang yang tidak ideal 3. Kondisi ruas jalan alternatif yang ada kurang ideal 4. Pusat pertumbuhan belum terbentuk secara merata 5. Perlintasan sebidang 6. Belum semua jalan bermarka dan dilengkapi rambu serta PJU
2.	Transportasi publik belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan kota kurang nyaman 2. BRT (<i>Bus Rapid Transit</i>) dan JRC (<i>Jabodetabel Residence Connection</i>) masih terbatas 3. Belum adanya subsidi bagi angkutan umum 4. Angkutan massal berbasis rel di 4 (empat) koridor belum terlaksana

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
3.	Integrasi dan konektivitas transportasi belum terbentuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. TOD atau hub belum terlaksana 2. Simpul transportasi masih kurang memadai 3. <i>Park and ride</i> belum tersedia 4. Halte belum merata 5. Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi 6. <i>First and last mile</i> tidak efisien
4	Pengelolaan Parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan parkir di badan jalan belum dilaksanakan secara optimal 2. Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki potensial untuk dikembangkan sebagai fasilitas perparkiran belum dilakukan secara optimal 3. Sebagian besar gedung-gedung belum menyediakan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
5	Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya disiplin dan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat 2. Masih banyaknya titik rawan kecelakaan (Blackspot) 3. Belum optimalnya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda 4. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan

1.6. Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam LKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Merupakan Uraian singkat tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan serta anggaran.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian LAKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Bab yang memuat kesimpulan dan saran terkait kinerja yang dicapai Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi dan misi ini disusun untuk menjawab permasalahan umum daerah yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan kota dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi ke depan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Kota Depok tahun 2025–2029 yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah:

“Bersama Depok Maju”

Visi ini mencerminkan semangat kolaborasi dan inovasi dalam membangun Kota Depok agar lebih maju dalam berbagai aspek, dengan penekanan pada inklusivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Maju, mencerminkan kondisi Kota Depok yang modern, kreatif dan berdaya saing dengan sumber daya manusia yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, ekonomi yang kreatif berbasis teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara operasional, visi "Bersama Depok Maju" dijabarkan ke dalam tiga aspek utama yang berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan yaitu :

- a. Mempercepat penyediaan infrastruktur berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah;
- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan terintegrasi, serta memperkuat ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim;
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman secara merata.

Sebagai penjabaran visi Kota Depok, misi pembangunan Kota Depok 2025–2029 dalam rangka mewujudkan visi “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera” sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktivitas Masyarakat secara inklusif melalui Pembangunan yang secara selaras.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Teknologi.
4. Transformasi Pelayanan Publik.

Dinas Perhubungan mengemban tugas pada misi 2

2.2 Penetapan Kinerja Perubahan 2025

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 terdapat 3 indikator Kinerja Utama (IKU) dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Depok**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Mewujudkan Konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan	V/C Ratio	0,71
2	Meningkatnya efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan	Kecepatan rata-rata	34,80
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	59,97

Terdapat perbedaan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 dimana masih mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Depok**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan	v/c ratio	0,7
2	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Nilai Sakip	71,5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Perhubungan di Tahun 2025 di analisis menggunakan skala nilai peringkat kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Capaian Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	> 90	Sangat Tinggi	
2	76.00 – 90	Tinggi	
3	66.00 – 75	Sedang	
4	51.00 – 65	Rendah	
5	0 – 50	Sangat rendah	

Dengan mensinkronisasi RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029 dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (Dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Depok.

Capaian kinerja sasaran dengan target indikator yang ditetapkan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja sesuai PK Perubahan 2025

Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Status Capaian
Mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan	1. V/C Ratio	0,72	0,72	0.71	0,73	97%	0,65%	Tidak Tercapai
Meningkatnya Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang	2. Kecepatan Rata-rata	-	-	34,80	37,88	109%	36	Tercapai

Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Status Capaian
berkeselamatan dan berkelanjutan								
Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola digital	3. Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	N/A	N/A	59,97	59,91	99,9%	69	Tidak Tercapai

3. 2 Realisasi Kinerja V/C Ratio dan Kecepatan rata-rata

3.2.1 V/C Ratio

3.2.1.1 Definisi Operasional/DO

Tingkat pelayanan didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif (rasio volume per kapitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional seperti kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam arus lalu lintas serta penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015, penetapan tingkat pelayanan jalan (Level of Services) bertujuan untuk 40 menetapkan tingkat pelayanan ruas jalan dan/atau persimpangan. Indikator tingkat pelayanan jalan yang meliputi:

- a. Kecepatan Rata – rata,
- b. V/C Ratio (nisbah volume/kapasitas)
- c. Kapasitas jalan

Level of Service (LoS) dapat diketahui dengan melakukan perhitungan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.

LOS (Level of Service) = $\frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}}$

Kapasitas Jalan

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997

Realisasi LoS Kota Depok didapat dari rata rata LoS beberapa ruas jalan sebagai berikut:

- Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik persatuan waktu pada lokasi tertentu.
- Kapasitas jalan adalah jumlah kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut.
- Besarnya volume lalu-lintas dan kapasitas jalan diperoleh dari hasil survey inventarisasi jalan, survei pencacahan lalu lintas terklasifikasi (traffic counting) dan survei kecepatan sesaat (spot speed).

Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan. Tingkat pelayanan memiliki rentang dari A sampai dengan F. Tingkat pelayanan A mewakili kondisi operasi pelayanan terbaik dan tingkat pelayanan F mewakili kondisi operasi pelayanan terburuk yang dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Batas Lingkup V/C
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah. Pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0,00 – 0,19
B	Dalam zone arus stabil. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,25 – 0,44
C	Dalam zone arus stabil. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	0,45 – 0,75
D	Mendekati arus tidak stabil dimana hampir seluruh pengemudi akan dibatasi Volume pelayanan berkaitan dengan kapasitas yang dapat ditolerir (diterima)	0,75 – 0,84
E	Volume lalu lintas mendekati atau berada pada kapasitasnya. Arus adalah tidak stabil dengan kondisi yang sering berhenti	0,85 – 1,0
F	Arus yang dipaksakan atau macet pada kecepatan yang rendah. Antrian yang panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	Lebih dari 1,0

Kajian Kinerja Ruas Jalan di Kota Depok dilaksanakan secara rutin setiap tahun dalam Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja ruas jalan, kecepatan rata-rata, mengetahui jumlah volume kendaraan, hambatan samping serta merekomendasikan usulan penanganan perbaikan. Kinerja ruas jalan di Kota Depok tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kinerja Ruas Jalan Di Kota Depok Tahun 2025

No.	Nama Ruas Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas	Volume	V/C Rasio	Kec.	V/C Rasio Rata - Rata	Kecepatan Rata - Rata	Level Of Service
1	Jl. Margonda Raya	6/2D	8.712		0.70	36.22	0,73	37.88	C (Arus stabil, pengemudi dibatasi untuk memilih kecepatan)
2	Jl. Raya Bogor	4/2D	5.344		0.80	50.25			
3	Jl. Siliwangi	2/2D	2.710		0.67	38.73			
4	Jl. Sawangan Raya	2/2UD	2.818		0.98	31.00			
5	Jl. Parung Raya	4/2D	5.586		0.67	36.87			
6	Jl. Cinere Raya	4/2D	3.444		0.72	30.64			
7	Jl. Ir. H. Juanda	4/2D	7.349		0.90	39.45			
8	Jl. Nusantara	4/2 UD	3.068		0.79	37.21			
9	Jl. A.R. Hakim	4/2 D	6.040		0.69	42.36			
10	Jl. Komjen Pol Jasin	2/2 UD	3.342		0.35	36.06			

Sumber : Kajian Kinerja Persimpangan dan Ruas Jalan Kota Depok, Dishub 2025

Berdasarkan hasil kajian tersebut, capaian tingkat pelayanan jalan tahun 2025 adalah 0,73 (C). Capaian ini belum sesuai dengan target tahun 2025 yang dapat diartikan tingkat pelayanan jalan dalam zone arus stabil dengan tingkat kecepatan belum dapat dikontrol oleh lalu lintas.

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Status Capaian
Level of Service (LoS)	C (0,72)	C (0,71)	C (0,73)	97%	C (0,65)	Tidak Tercapai

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 0,01 yaitu dari capaian 0,72 turun menjadi 0,73 yang mengindikasikan tingkat pelayanan jalan masih kurang lancar. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2025 dan target akhir RPJMD masih belum memenuhi target.

3.2.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota lain diperoleh dari Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1.	V/C Ratio	0,63	0,65

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor

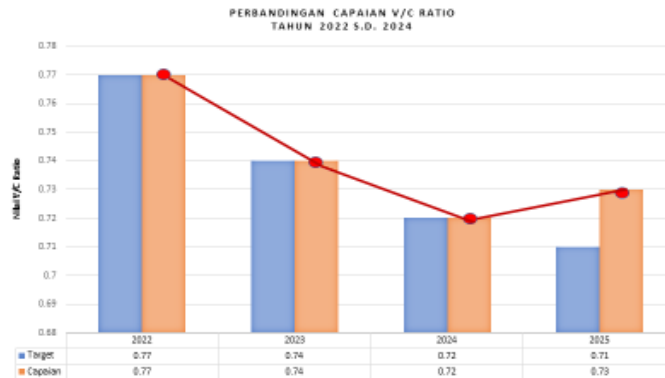
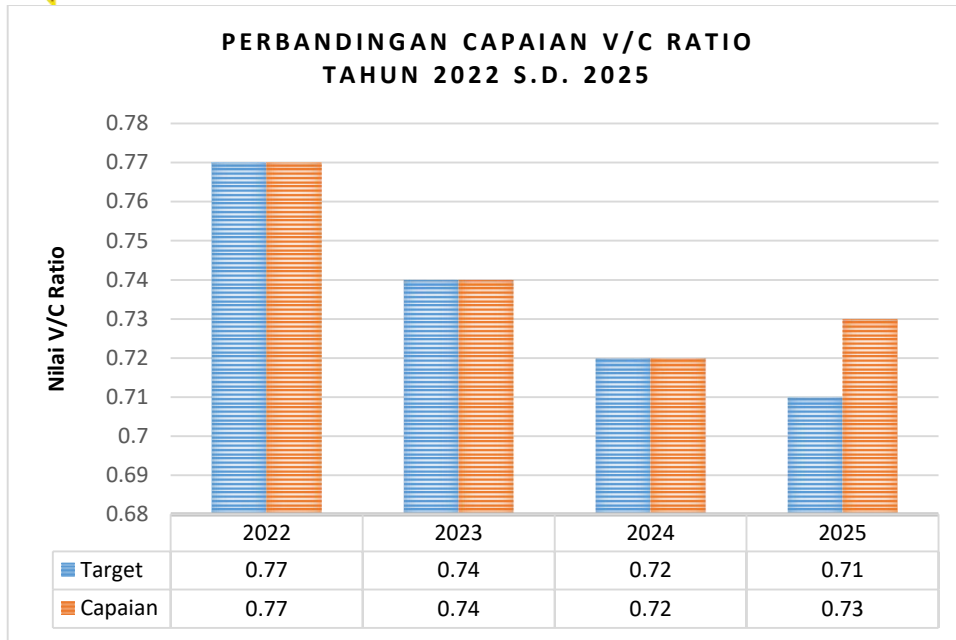
Kota Depok dengan target 0,71 (C) dan realisasi 0,73 (C) capaian 97% dapat diartikan dalam zone arus stabil, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Ada perbaikan/ peningkatan tingkat pelayanan jalan dari tahun lalu dengan upaya yang dilakukan diantaranya perbaikan infrastruktur, penataan simpang, pembukaan tol, adanya jalur alternatif/baru.

3.2.1.3 Realisasi Kinerja V/C Ratio dari Periode Tahun 2022-2025

Tabel 3.5 Tabel realisasi kinerja V/C Ratio

No.	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
1.	V/C Ratio	0,77	0,74	0,72	0,73

Dari Tahun Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, pencapaian kinerja V/C Ratio dapat dikatakan meningkat namun pada tahun 2025 terjadi penurunan. Untuk Tahun 2025 V/C Ratio Dinas Perhubungan sebesar 0,73 ada pada Tingkat Pelayanan Kategori C dengan Nilai 0,45-0,75. Nilai V/C Ratio dikatakan semakin baik apabila mendekati nilai 0 (Tingkat Pelayanan Kategori A dengan nilai 0,00-0,19). Berikut perbandingan nilai V/C Ratio dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.



3.2.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Standar nasional volume-to-Capacity (V/C) Ratio di Indonesia yang menunjukkan perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya tidak ada namun umumnya ditargetkan dibawah 0,85, dengan nilai ideal dibawah 0,85 untuk mempertahankan kelancaran lalu lintas. Nilai V/C Ratio lebih dari atau sama dengan 0,85 menunjukkan lalu lintas mendekati jenuh, memerlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas

3.2.2 Kecepatan rata-rata

3.2.2.1. Definisi Operasional/DO

Kecepatan Tempuh merupakan kecepatan rata-rata (km/jam) arus lalu lintas dihitung dari panjang jalan di bagi waktu tempuh rata-rata kendaraan yang melalui segmen jalan. Semakin tinggi kecepatan rata-rata menandakan semakin lancar arus lalu lintas

Kecepatan rata-rata dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara Panjang jalan dibagi waktu tempuh.

$$\text{Kecepatan rata-rata} = \frac{\text{Panjang jalan}}{\text{Waktu tempuh}}$$

Sumber : Permenhub No.96 Tahun 2015

Kecepatan rata-rata termasuk salah satu ukuran dari kinerja lalu lintas yang dinyatakan km/jam

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Status Capaian
Kecepatan Rata-rata	-	34,80	37,88	109%	36	Tercapai

3.2.2.2 Realisasi Kinerja Kecepatan rata-rata dari Periode tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kecepatan rata-rata merupakan indikator baru yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 oleh karena itu tidak tersedia realisasi pembandingan dari tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota lain diperoleh dari Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1.	Kecepatan rata-rata	36,45	37,88

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor

3.2.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Untuk kecepatan rata-rata tidak ada standar nasional yang ditetapkan namun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015, batas kecepatan kendaraan di Indonesia diatur berdasarkan jenis kawasan:

- **Kawasan Permukiman:** Maksimal **30 km/jam**.
- **Kawasan Perkotaan:** Maksimal **50 km/jam**.
- **Jalan Antar Kota:** Maksimal **80 km/jam**.
- **Jalan Bebas Hambatan (Tol):** Antara **60–100 km/jam** (minimal 60, maksimal 100).

3.2.2.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja *V/C ratio* dan *Kecepatan rata-rata* serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.2.2.5.1 Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Ruas Jalan (*V/C Ratio*)

Pencapaian indikator kinerja ruas jalan didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Beroperasinya angkutan umum massal Teman Bus Trans Depok
Pengoperasian layanan Teman Bus Trans Depok (sementara lagi akan trayek Terminal Depok - Harjamukti, berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya pada koridor layanan tersebut. Kehadiran angkutan umum massal yang terjadwal dan terintegrasi meningkatkan peralihan moda (mode shift) masyarakat ke transportasi publik.



b. Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Tugu Batu Sawangan
Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada kawasan Tugu Batu Sawangan menjadi salah satu intervensi strategis dalam mengurangi kepadatan pada simpang Tugu Batu Sawangan dan sekitarnya. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- Penataan pola pergerakan kendaraan pada simpang Sawangan Permai dan Tugu Batu Sawangan
- Penempatan Barrier pada Jalan Muchtar Raya, untuk mengurangi titik konflik
- Penertiban hambatan samping di sekitarnya

Implementasi MRL tersebut mengurangi tundaan, memperpendek panjang antrian kendaraan, serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas pada jam sibuk.



c. Pengembangan Teknologi Pengawasan Lalu Lintas melalui IAS-TC

Penerapan sistem Intelligent Area System – Traffic Control (IAS-TC) membantu dalam pemantauan kondisi lalu lintas secara real time melalui CCTV dan sistem kendali terpusat. Serta diupayakan untuk pengembangan dengan penggunaan IAS-TC AI yang dapat mengubah fase APILL secara real time menyesuaikan kepadatan lalu lintas pada simpang yang di amati.



d. Pemasangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Penyediaan serta pemeliharaan rambu, marka, APILL, guardrail, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya meningkatkan keteraturan dan keselamatan lalu lintas. Perlengkapan jalan yang memadai membantu mengurangi konflik pergerakan kendaraan serta meningkatkan kepatuhan pengguna jalan, yang berdampak pada kelancaran arus lalu lintas.



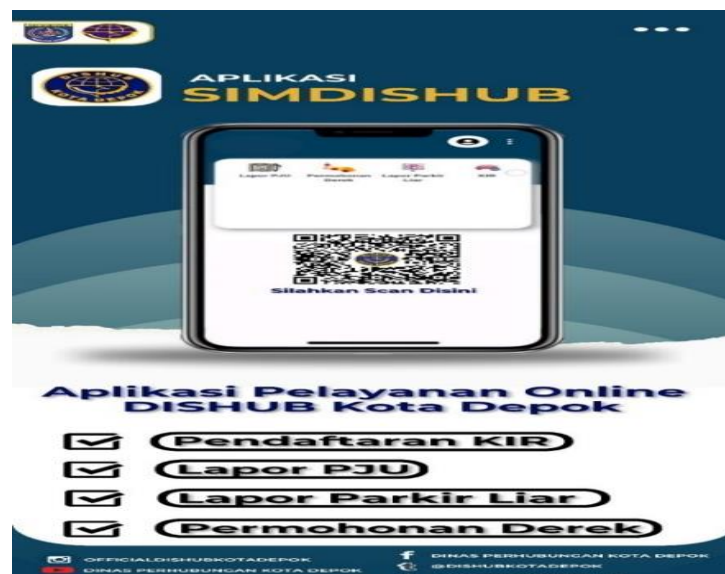
e. Penertiban Parkir Liar

Kegiatan penertiban parkir liar secara rutin mengurangi hambatan samping pada badan jalan. Dengan berkurangnya kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, kapasitas efektif jalan dapat dipertahankan sehingga pergerakan lalu lintas menjadi lebih lancar dan stabil.



f. Pengaplikasian SIM Dishub

Penerapan aplikasi SIM Dishub sebagai sarana pengaduan masyarakat mempercepat identifikasi permasalahan lalu lintas di lapangan. Mekanisme respons cepat terhadap laporan masyarakat membantu mengatasi gangguan lalu lintas secara lebih efektif dan tepat waktu seperti pengaduan parkir liar, PJU yang tidak menyala, maupun kendaraan mogok yang membutuhkan bantuan kendaraan derek.



g. Pengaturan Lalu Lintas oleh Petugas di Lapangan

Penempatan petugas pada titik-titik rawan kepadatan, khususnya pada jam sibuk, membantu mengurai kemacetan dan mengoptimalkan pergerakan kendaraan.



h. Peningkatan Layanan Uji KIR

Peningkatan kualitas layanan pengujian kendaraan bermotor (Uji KIR) memastikan kendaraan angkutan umum dan barang yang beroperasi dalam kondisi laik jalan. Kendaraan yang memenuhi standar teknis cenderung mengurangi potensi gangguan di jalan seperti mogok atau kerusakan yang dapat menyebabkan hambatan arus lalu lintas.



i. Reaksi Cepat Penanganan Derek

Pelayanan derek yang responsif terhadap kendaraan mogok atau kecelakaan di badan jalan mampu mempercepat proses evakuasi dan meminimalkan dampak

kemacetan. Penanganan cepat ini berperan penting dalam menjaga kelancaran lalu lintas serta mencegah peningkatan nilai VC Ratio akibat hambatan insidental.

j. Koordinasi yang Baik dengan Dinas PUPR dalam Persiapan Pekerjaan Infrastruktur Terjalannya koordinasi yang efektif antara Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan maupun pembangunan infrastruktur pendukung turut menjaga stabilitas kinerja lalu lintas. Koordinasi tersebut meliputi:

- Sinkronisasi jadwal pekerjaan konstruksi agar tidak bertepatan dengan periode beban lalu lintas tertinggi.
- Penyusunan manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) selama masa pekerjaan.
- Evaluasi dampak lalu lintas sebelum pelaksanaan kegiatan fisik.
- Penyiapan jalur alternatif dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan adanya koordinasi yang baik, potensi gangguan lalu lintas akibat pekerjaan konstruksi dapat diminimalkan, sehingga nilai VC Ratio tetap terkendali dan kecepatan kendaraan tidak mengalami penurunan signifikan selama masa pelaksanaan pekerjaan.



k. Pengaktifan Stasiun Pondok Rajeg

Aktifnya kembali operasional Stasiun Pondok Rajeg mengurangi kepadatan pada stasiun Depok Lama maupun Citayam dikarenakan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Cilodong, dan berasal dari Kabupaten Cibinong beralih ke Stasiun Pondok Rajeg. Sehingga mengurangi beban lalu lintas pada Jalan GDC dan Jalan Kartini.

Dikarenakan pengguna KRL pada Stasiun Pondok rajeg semakin meningkat maka berdampak pada bertambahnya volume kendaraan pengantar dan penjemput pada ruas Jalan Kampung Sawah.



- I. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi implementasi Andalalin
 Tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa rekomendasi andalalin yang dikeluarkantelah dilaksanakan sehingga pembangunan perumahan/sekolah/temapt usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan permasalahan lalu lintas.



3.2.2.5.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Ruas Jalan (V/C ratio)

Meskipun indikator kinerja jalan menunjukkan kondisi yang masih terkendali, terdapat faktor yang menghambat peningkatan kinerja lalu lintas di Kota Depok, sebagai berikut :

a. Infrastruktur Jalan yang Masih Terbatas

Keterbatasan infrastruktur jalan menjadi salah satu hambatan utama dalam menjaga kestabilan VC Ratio dan kecepatan kendaraan, yang ditandai dengan:

- Terbatasnya ketersediaan ruas jalan pendamping sehingga distribusi arus lalu lintas belum optimal.
- Kapasitas lajur dan simpang yang belum ideal
- Kondisi ruas jalan alternatif yang belum memadai untuk menampung peralihan arus
- Pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang belum berkembang secara merata
- Keberadaan perlintasan sebidang yang menghambat kelancaran arus lalu lintas
- Belum seluruh ruas jalan dilengkapi marka, rambu lalu lintas, dan PJU secara optimal

b. Pertumbuhan Volume Kendaraan yang Signifikan

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan menyebabkan peningkatan beban lalu lintas, terutama pada jam sibuk. Tingginya mobilitas masyarakat dan pergerakan komuter menuju wilayah DKI Jakarta turut memberikan tekanan terhadap ruas-ruas jalan utama.

c. Tingginya Hambatan Samping

Aktivitas perdagangan, parkir pada badan jalan, kendaraan berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, serta aktivitas bongkar muat barang masih menjadi hambatan samping yang mempengaruhi kapasitas efektif jalan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kecepatan kendaraan dan meningkatkan nilai VC Ratio.

d. Perilaku Pengguna Jalan yang Kurang Tertib

Masih ditemukannya pelanggaran rambu dan marka jalan, kendaraan berhenti sembarangan, serta pergerakan kendaraan roda dua yang tidak sesuai dengan ketentuan turut mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan potensi konflik antar kendaraan

e. Dampak Pekerjaan Konstruksi dan Utilitas

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, perbaikan jalan, maupun pekerjaan utilitas oleh berbagai pihak terkadang menyebabkan penyempitan lajur sementara dan pengurangan kapasitas jalan. Apabila tidak dikelola dengan optimal, kondisi ini dapat meningkatkan kepadatan dan menurunkan kecepatan kendaraan

f. Faktor Insidental

Kejadian tidak terduga seperti kendaraan mogok, kecelakaan lalu lintas, genangan air saat hujan, maupun gangguan lainnya dapat menyebabkan hambatan sementara yang berdampak pada peningkatan tundaan dan kepadatan arus lalu lintas

3.2.2.5.3 Upaya Perbaikan dan Strategi Penguatan Kinerja

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja ruas jalan, telah dan akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Transportasi Publik

- Pengembangan layanan Teman Bus Trans Depok
- Peningkatan kualitas layanan dan jangkauan angkutan umum perkotaan
- Pengembangan integrasi simpul transportasi pada Stasiun Pondok Rajeg
- Pengembangan layanan Terminal Sawangan

b. Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- Pengembangan sistem IAS-TC untuk pemantauan kondisi lalu lintas secara real time
- Pengaturan lalu lintas oleh petugas pada titik rawan kemacetan
- Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) pada ruas jalan yang sudah jenuh

c. Mendorong Implementasi Kajian Redesain Simpang pada Titik Rawan Kemacetan

Sebagai tindak lanjut hasil kajian teknis kinerja simpang, dilakukan implementasi redesain pada simpang-simpang dengan tingkat kejenuhan tinggi dengan mendorong pembebasan lahan, dan konstruksi perbaikan geometrik simpang.

- d. Peningkatan Infrastruktur dan Keselamatan Jalan
- Pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka, APILL, dan PJU
 - Koordinasi dengan Dinas PUPR dalam pelebaran jalan dan pembangunan infrastruktur guna meminimalkan dampak terhadap arus lalu lintas
- e. Penertiban dan Pengendalian Hambatan Samping
- Penertiban parkir liar secara konsisten
 - Reaksi cepat derek kendaraan mogok atau kecelakaan.
 - Penguatan pengawasan melalui aplikasi SIM Dishub
- f. Peningkatan Kelaikan Kendaraan
- Optimalisasi layanan Uji KIR untuk memastikan kendaraan laik jalan dan meminimalkan potensi gangguan di ruas jalan, dan peningkatan layanan online.

3.2.3 Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan

Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi antara lain : peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola organisasi Dinas Perhubungan.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan tidak bisa dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitar Kota Depok karena indikator kinerja ini tidak menjadi indikator kinerja Kabupaten/Kota lain.

3.2.3.1 faktor-faktor pendukung capaian indeks reformasi birokrasi Dinas Perhubungan

Faktor-faktor pendukung capaian indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Implementasi RB Tematik (Fokus Dampak)

RB Tematik memfokuskan birokrasi pada penyelesaian masalah langsung di internal dinas, yang meningkatkan nilai indeks secara signifikan. Diantaranya :

Digitalisasi Administrasi Pelayanan : Percepatan penerapan teknologi digital dalam semua pelayanan.

2. Digitalisasi dan Integrasi Sistem (Smart Governance)

Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi (E-Government) mengurangi potensi KKN dan meningkatkan transparansi.

- **Public Service Malls (MPP):** Integrasi layanan fisik dan digital.
- **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):** Penyederhanaan alur kerja bisnis.

3. Komitmen Pimpinan dan Manajemen Perubahan

Komitmen "tone at the top" sangat krusial, di mana pemimpin (kepala dinas) menjadi penggerak langsung perubahan.

- **Kultur Kerja Baru:** Transformasi pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset) ASN agar lebih adaptif dan inovatif.
- **Quick Wins:** Langkah inisiatif cepat yang berfokus pada pemberantasan KKN dan peningkatan layanan.

4. Akuntabilitas dan Pengawasan

Penguatan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah.

- **Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian):** Laporan keuangan yang akuntabel.
- **Zona Integritas (ZI):** Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3.2.3.2 Faktor-faktor penghambat capaian indeks reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan

Faktor-faktor penghambat capaian indeks reformasi birokrasi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Budaya Kerja dan Pola Pikir (Mindset) Birokrat

- **Resistensi terhadap Perubahan:** Masih kuatnya budaya "nyaman" dengan pola kerja lama (status quo) dan keengganan untuk bertransformasi ke arah digital.
- **Mentalitas Prosedural:** Birokrasi seringkali lebih fokus pada pemenuhan administrasi (dokumen) daripada dampak nyata (outcomes) bagi masyarakat.
- **Patologi Birokrasi:** Adanya perilaku koruptif, kolusi, nepotisme, dan disiplin/etos kerja yang rendah masih ditemukan di lapangan.

2. Lemahnya Komitmen Pimpinan (Leadership)

- **Kurang Pimpinan yang Menjadi Role Model:** Reformasi birokrasi sering kali tidak berjalan maksimal karena tidak didukung oleh pimpinan yang konsisten dan memiliki visi kuat dalam melakukan perubahan.

- **Orientasi Jangka Pendek:** Kebijakan reformasi sering terhenti ketika terjadi pergantian pimpinan (kepala Dinas).
3. Kualitas SDM Aparatur
 - **Kapasitas SDM Terbatas:** Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan sistem informasi atau analisis kebijakan.
 4. Masalah Teknis dan Infrastruktur
 - **Digitalisasi Belum Merata:** Masalah pada integrasi sistem informasi (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE), internet, dan infrastruktur IT.
 - **Evaluasi RB Formalitas:** Proses penilaian RB seringkali dianggap hanya sebagai pemenuhan dokumen evaluasi, belum mencerminkan perbaikan nyata di lapangan.
 5. Koordinasi dan Anggaran
 - **Silokrasi (Silo Mentality):** Lemahnya koordinasi antar unit kerja atau antar instansi, di mana masing-masing bekerja sendiri-sendiri.
 - **Keterbatasan dan Realokasi Anggaran:** Kendala dalam pembiayaan kegiatan reformasi birokrasi atau adanya realokasi anggaran yang mengurangi fokus pada program inovasi.

Sasaran VC Ratio dan Kecepatan Rata-Rata di dukung oleh 1 (Satu) program 8 kegiatan 18 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)

- a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- e. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- f. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.
- g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- h. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- i. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPT PJU)
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- j. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - 2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - 4) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - 5) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Dalam mencapai target indikator tujuan dan sasaran di dukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggarannya. Keterkaitan antara pencapaian/pengukuran rencana aksi dan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN KINERJA (V/C RATIO) dan KECEPATAN RATA-RATA

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Mewujudkan konektivitas aksesibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan	V/C RATIO	0,71	0,73	URAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan	KECEPATAN RATA-RATA			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa

				Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3.3. Capaian Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Depok senantiasa berupaya melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, adapun capaian strategis tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Load factor Teman Bus

Keberhasilan Teman Bus-Trans KORIDOR TERMINAL DEPOK- ST LRT HARJAMUKTI dan Rencana Pengembangan 44 pemberhentian dengan Prasarana 11 halte dan 4 TPB Panjang Lintasan 34 km Jumlah Armada 15 unit dengan Headway 10 Menit 11 Load Factor 142% 5.900 pnp per Hari.

2. Kolaborasi Trans Jakarta

Kolaborasi Transjakarta rute sawangan-lebak buluk via tol desari menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan transportasi massal yang aman, nyaman dan terintegrasi

3. Reayasa tugu batu Sawangan

Pelaksanaan Manajemen Reayasa Lalu Lintas pada kawasan Tugu Batu Sawangan menjadi salah satu intervensi strategis dalam mengurai kepadatan pada simpang Tugu Batu Sawangan dan sekitarnya.

4. Peringkat 3 penilaian layanan

Dinas Perhubungan memperoleh peringkat ke-3 hasil evaluasi kinerja pelayanan public tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim dari bagian Organisasi Sekretariat Kota Depok.



5. Upgrading layanan SIMDISHUB

Sebagai bagian dari Inovasi digital yang kini tersedia di Play Store. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan Dinas Perhubungan seperti: Permohonan Dere, Pelaporan Parkir Liar hingga pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu aplikasi ini juga men digitalisasi beberapa proses penting seperti pengelolaan data Penerangan Jalan umum (PJU) dan integrasi dengan system ATCS (*Area Traffic Control System*) yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan.

6. Inisiasi Kolaborasi Pelaksanaan CFD

Dinas Perhubungan sebagai Dinas Penggerak pelaksanaan CFD di Kota Depok dengan melakukan reayasa lalu lintas selama CFD berjalan. Petugas Pengatur lalu lintas (Gatur) Dinas Perhubungan di kerahkan untuk mengamankan jalannya CFD. Dalam Pelaksanaan CFD ini Dinas Perhubungan Kota Depok bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Polres Kota Depok (ketertiban dan keamanan), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (stand Kuliner UMKM), Dinas

Pemuda dan Olahraga (Sarana dan aktifitas Olahraga), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Keamanan dan ketertiban pedagang kaki lima), Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan (Kebersihan selama dan setelah CFD berjalan), Dinas PUPR (Kondisi jalan)

7. Inisiasi Rekayasa lalu lintas boulevard GDC

Pembangunan Bundaran GDC pada Tahun 2025 DED awal atas usulan Dinas Perhubungan namun pembangunannya dilakukan oleh Dinas PUPR. Dinas Perhubungan berperan melakukan rekayasa lalu lintas setelah bundaran/Boulevard GDC dibangun.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2025 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama tidak semuanya mencapai target yang ditetapkan yaitu V/C Ratio dengan target 0,71 realisasi 0,73 (97%) dan capaian indikator Kecepatan rata-rata dengan target 34,80 realisasi 37,88 (109%), Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan dengan 59,97% realisasi 81,10% (99,9%)
2. Jumlah anggaran yang terserap untuk mencapai kinerja tersebut dari pagu anggaran sebesar Rp. 111.343.637.376 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 106.919.426.416 atau 96,03%.

DOKUMENTASI KEGIATAN

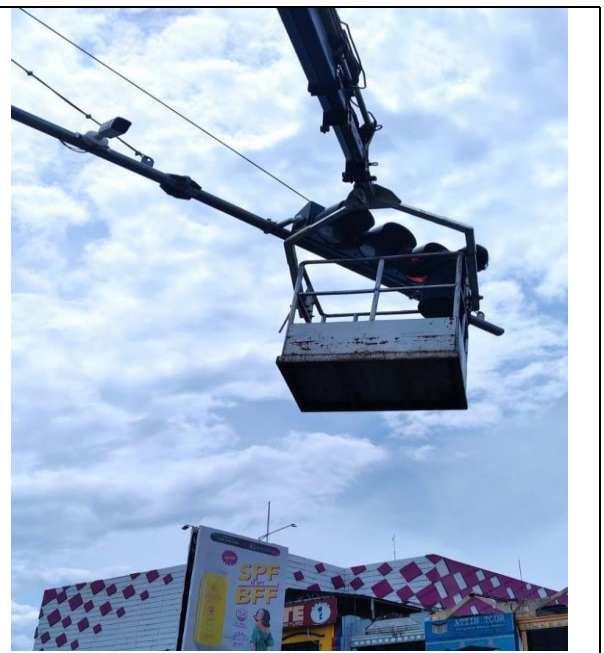


Berikut adalah sejumlah dokumentasi yang menjelaskan serangkaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Kota Depok pada tahun 2025:



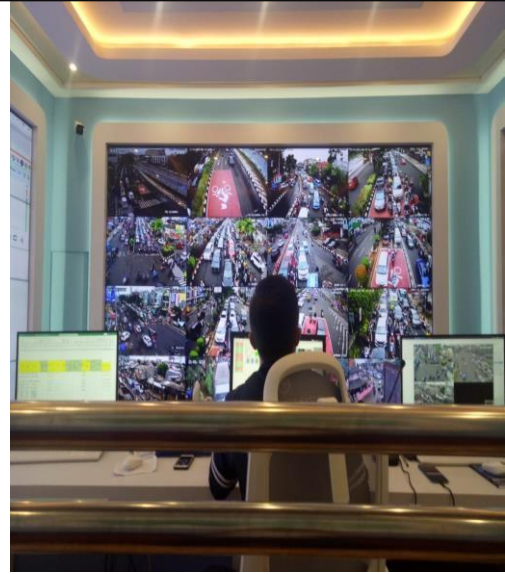
Keterangan:

- ❑ Gambar kiri : Pelaksanaan Forum OPD Dinas Perhubungan Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Kerja tahun 2026
- ❑ Gambar kanan : Rapat Kordinasi internal dalam rangka Monev Kegiatan



Keterangan:

Pemasangan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas



Keterangan:

- Gambar Kiri : pemeliharaan halte
- Gambar kanan : Pemantauan arus lalu lintas dari ruang ATCS Dinas Perhubungan

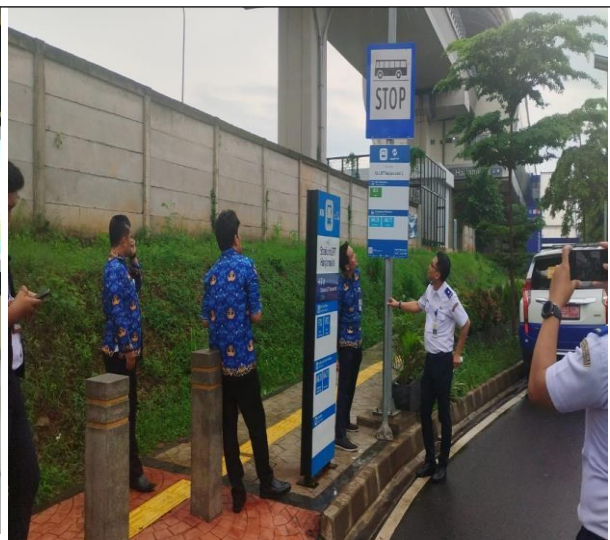


- Rapat Pembahasan Pelaksanaan kembali Car Free Day Kota Depok Tahun 2025



Keterangan :

- Rapat koordinasi Bangun Guna Serah (BGS) Terminal Terpadu Kota Depok



Keterangan :

- Kiri bawah : sosialisasi rerouting trayek
- Kanan bawah : survey bus stop oleh BPTJ



Keterangan :

- Kiri atas : petugas pengawasan keselamatan lalu lintas
- Kanan atas : penertiban parkir liar



16 Jan 2025 10.45.18
 Jatimulya
 Kecamatan Cilodong
 Kota Depok
 Jawa Barat

Keterangan :

- Layanan PJU
- Layanan Uji Kir



TERIMA KASIH